

LAPORAN BULAN APRIL DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN TAHUN 2025



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

***NATIONAL
FOOD
AGENCY***

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LK) Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan bulan APRIL Tahun 2025 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sampai dengan bulan APRIL 2025. Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode bulan APRIL Tahun 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Laporan ini dibuat dan disusun untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan program serta kegiatan yang disertai pertanggung jawaban penggunaan anggaran sebagaimana amanat dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atas tersusunnya Laporan ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belumlah sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami kedepan. Semoga Laporan Bulan APRIL Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Ketersediaan dan
Stabilisasi Pangan



Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
BAB II.....	6
RENCANA KINERJA OUTPUT/RO	6
BAB III.....	9
PELAKSANAAN KEGIATAN.....	8
A. Realisasi Fisik dan Keuangan.....	8
B. Monitoring Kegiatan Prioritas.....	10
BAB IV	45
PENUTUP	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pangan merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin oleh negara. Peran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan. Namun lebih jauh dari itu, pangan dengan kandungan gizi di dalamnya berperan nyata bagi peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia Indonesia yang sehat, aktif dan produktif. Oleh karena itu, penyelenggaraan pangan menjadi salah satu prioritas dalam mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan pangan diindikasikan dengan situasi dan kondisi ketahanan pangan nasional yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Ketersediaan dan stabilisasi pangan merupakan faktor kunci dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Perwujudan ketersediaan pangan dilaksanakan melalui pengelolaan neraca pangan, neraca bahan makanan, pengendalian ekspor impor, cadangan pangan pemerintah, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk memperpanjang umur simpan komoditas pangan.

Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tanggadan perseorangan, pemerintah melaksanakan kebijakan dalam distribusi dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dilakukan antara lain melalui fasilitasi distribusi pangan (FDP), mobilisasi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, pelaksanaan gerakan pangan murah, penetapan kebijakan harga pangan, serta koordinasi, monitoring, dan pengawasan harga pangan.

Kewenangan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam rangka mewujudkan pangan yang tersedia dalam jumlah cukup dapat diakses dengan mudah meliputi komoditas beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas dan cabai.

Oleh karena itu, sasaran Deputy Bidang Ketersediaan dan

Stabilisasi Pangan berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 fokus dalam mencapai: (1) Terwujudnya pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan; (2) Terwujudnya stabilisasi dan pasokan harga pangan di seluruh wilayah; dan (3) Terwujudnya cadangan pangan pemerintah dan terkelolanya sistem distribusi pangan nasional yang efisien.

Laporan kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan periode bulan APRIL 2025 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama tahun 2025, laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada periode yang akan datang.

1.2 TUJUAN

- a. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada bulan APRIL 2025.
- b. Melakukan Pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada bulan APRIL 2025

1.3 METODOLOGI PENYUSUNAN LAPORAN

- a. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output dari UKE 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
- b. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
- c. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II

RENCANA KINERJA OUTPUT/RO

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Pada rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki suatu instansi. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025.

Mengacu pada Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Penetapan Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 disusun untuk melaksanakan program dan kegiatan ketersediaan dan stabilisasi pangan. Pada tahun 2025, mengacu pada DIPA Nomor: SP.DIPA-125.01.1.690590/2025 Tanggal 2 Desember 2024, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga dengan mengampu sebanyak 6 (enam) klasifikasi rincian output (KRO) dan 6 (enam) Rincian Output (RO). Sebagai tindak lanjut pencaapaian program/kegiatan tersebut, maka disusun rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan APRIL tahun 2025 akan dilihat dari pencapaian output/RO, komponen dan sub komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA pada bulan APRIL Tahun 2025. Pada bulan APRIL tersebut ditargetkan sebesar 10%. Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Target Fisik dan Keuangan Bulan APRIL Sesuai DIPA Revisi II Deputi
Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan APRIL 2025	
Program , Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan 10% (Rp)	Fisik
ABR- Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	370.976.000	2 rekomendasi kebijakan	37.097.600	0
	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	772.080.000	12 rekomendasi kebijakan	230.624.000	4
	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	599.954.000	6 rekomendasi kebijakan	59.995.400	1
AEA- Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	969.585.000	6 kegiatan	96.958.500	1
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	343.898.000	1 Kegiatan	34.389.800	1
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	3.190.657.000	1 kegiatan	319.565.700	1
	NSPK Ketersediaan Pangan	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	257.680.000	6 NSPK	25.768.000	1

AFA- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	38.400.000	10 NSPK	3.840.000	4
	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	382.621.000	14 NSPK	38.262.100	1
BDD – Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang terdistribusi	900.000.000	50 Kelompok Masyarakat	27.000.000	15
		Gerakan Pangan Murah yang diaksanakan	1.220.000.000	1 Kelompok Masyarakat	366.000.000	1
		Kios Pangan yang dikembangkan	150.070.000	1 Kelompok Masyarakat	45.021.000	1
QMA - Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	879.423.000	4 Data	87.942.300	0
	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	10.765.725.000	12 Data	5.030.276.740	4
	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	162.371.000	1 Data	16.237.100	0
BEC – Bantuan Produk	Bantuan Produk	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	36.430.340.000	Kelompok Masyarakat	36,430.340.000	2.238.906 Paket

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan kegiatan KRO dan Output untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, khususnya pada kegiatan Koordinasi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Realisasi keuangan pada bulan APRIL Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan disajikan per kegiatan, KRO, RO, Komponen dan sub komponen dari masing-masing Direktorat lingkup kedeputian sebagaimana tabel 2 berikut:

Tabel 2
Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan APRIL Sesuai DIPA Revisi I Deputi Bidan Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Target Bulan APRIL 2025		Realisasi Bulan APRIL 2025	
Program , Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan 10% (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
ABR- Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	37.097.600	0	0	0
	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	230.624.000	4	263.123.978	5
	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	59.995.400	1	0	1
AEA- Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev Dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	96.958.500	1	21.774.900	1

	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	34.389.800	2	10.000.000	2
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	319.565.700	1	22.500.000	1
AFA- NorMa, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Ketersediaan Pangan	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	25.768.000	1	3.000.000	1
	NSPK Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	3.840.000	4	0	4
	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	38.262.100	1	15.178.580	1
BDD – Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		Pangan yang terdistribusi	27.000.000	15	12.000.000	20
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	366.000.000	1	181.360.000	1
		Kios Pangan yang dikembangkan	45.021.000	1	14.480.700	1
QMA - Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	87.942.300	0	0	0
	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	5.030.276.740	4	1.035.629.480	3
	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	16.237.100	0	0	0
BEC – Bantuan Produk	Bantuan Produk	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	36,430.340.000	2.238.906 Paket	36.430.338.490	2.238.906 Paket

Berdasarkan Laporan hasil realisasi fisik dan keuangan pada Ouput/RO dan komponen lingkup Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada bulan APRIL tahun 2025 sebagaimana tabel di Realisasi anggaran per bulan APRIL 2025 berdasarkan hasil aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan sebesar Rp37.762.817.124,- atau 1,48% dari alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.548.458.010.000,-. Realisasi tersebut masih jauh dari rencana target penarikan bulan APRIL 2025, yaitu sebesar Rp254.845.801.000,- Faktor rendahnya reaisasi pada bulan APRIL disebabkan karena adanya alokasi anggaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sehingga mempengaruhi terhadap capaian realisasi bulanan. Selain itu, belum meratanya penyerapan anggaran di masing-masing RO di setiap Direktorat yang diakibatkan perencanaan kegiatan tidak terjadwal secara rutin. Sementara realisasi anggaran Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan berdasarkan hasil aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025 sebesar Rp40.548.463.994,- atau 1,59% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.548.458.010.000,- sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.510.695.192.876,-. Sisa anggaran yang relative besar perlu dibuat perencanaan bulanan secara terukur sehingga pada akhir tahun tidak terjadi permasalahan.

Pada bulan APRIL terdapat penambahan realisasi fisik dengan rincian, yaitu 6 RO Rekomendasi, 4 RO Koordinasi, 6 RO NSPK, Pangan Terdistribusi 20 Kelompok Masyarakat, 1 Kelompok GPM, 1 Kelompok Kios Pangan, dan 3 RO Data dan Informasi, serta 2.238.906 Paket CPP. Rendah realisasi anggaran terhadap target perlu menjadi perhatian agar perencanaan keuangan di masing-masing RO menjadi lebih baik di bulan selanjutnya.

B. Monitoring Kegiatan Prioritas

Hasil Monitoring Kegiatan prioritas lingkup Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama bulan APRIL 2025 sesuai dengan capaian realisasi keuangan, namun proses pelaksanaan kegiatan tetap diselenggarakan untuk mencapai realisasi fisik melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

a) Direktorat Ketersediaan Pangan

1. Rapat Evaluasi Realisasi Impor Daging Lembu Penugasan kepada BUMN Pangan
Rapat dilaksanakan pada tanggal 9 April 2025 melalui zoom meeting. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi realisasi impor daging lembu melalui penugasan kepada BUMN Pangan bersama dengan K/L terkait sebagai tindak

lanjut Risalah Rakortas tanggal 12 Februari 2025. Rapat dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan dan dihadiri oleh Perwakilan Asdep Tata Niaga Perdagangan Luar Negeri Kemenko Pangan, Direktur Kesmavet Kementan, Perwakilan Direktorat Impor Kemendag, Perwakilan Direktorat PLDK LNSW, Perwakilan Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk KBUMN, Perwakilan PT. Berdikari, dan Perwakilan PT. PPI.

Hasil pemantauan Panel Harga Pangan, harga daging lembu cenderung mengalami penurunan dari minggu lalu. Per tanggal 8 April 2025, harga daging sapi Rp 136.205/Kg, daging kerbau lokal Rp 141.559/Kg, dan daging kerbau beku Rp 107.398/Kg.

Berdasarkan data Simrek Ditjen PKH Kementan, stok daging lembu per tanggal 21 Maret 2025 sebesar 34.367,91 Ton (24.713,91 Ton di importir dan 9.654 Ton di Bulog). PT. Berdikari dan PT. PPI diharapkan segera melaporkan data stok melalui Simrek PKH setiap hari Jumat.

Berdasarkan Sinas NK, realisasi impor daging lembu secara total per tanggal 9 April 2025 sebesar 23.079,20 Ton (7,89% dari total PI terbit 489.111 Ton), sedangkan realisasi impor daging lembu melalui penugasan BUMN Pangan sebesar 1.306,60 Ton, baru daging sapi non Brazil dari PT. Berdikari (1,31% dari PI terbit 100.000 Ton), sedangkan daging kerbau belum ada realisasi.

PT. Berdikari sudah melakukan PO daging lembu sebesar 28.145 Ton dengan rincian 5.177 Ton daging sapi Brazil, 10.676 Ton daging sapi non Brazil, dan 12.292 Ton daging kerbau India. Selain itu, terdapat ETA daging kerbau di bulan April sebesar 1.680 Ton (60 kontainer) dengan ETA daging kerbau di hari ini sebesar 168 Ton (6 kontainer).

PT. PPI sudah melakukan PO daging lembu sebesar 18.435 Ton dengan rincian 3.808 Ton daging sapi Brazil, 599 Ton daging sapi non Brazil, dan 14.028 Ton daging kerbau India dengan ETA akhir April sampai Juni 2025. Tambahan yang masih dalam proses negosiasi sebesar 8.700 Ton daging kerbau dan 2.800 Ton daging sapi. Selain itu, saat ini juga sudah ada yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 168 Ton (6 kontainer) sejak tanggal 6 April 2025, namun belum dilaporkan di Sinas NK.

Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga, daging lembu penugasan diharapkan dapat terdistribusi ke seluruh wilayah Indonesia. Bapanas meminta BUMN Pangan mengirimkan data distributor di setiap provinsi yang menjadi target pemasukan daging lembu penugasan serta data stok (melalui Simrek Kementan) dari realisasi impor tahun 2024 dan 2025. PT. Berdikari dan PT. PPI akan berkoordinasi dengan D1 untuk mendapatkan data distribusi ke D2 sampai pengecer.

Rencana Tindak Lanjut, PT. Berdikari dan PT. PPI akan mengirimkan data-data yang diminta (surat pernyataan kesanggupan realisasi impor penugasan, data harga, data stok dari realisasi tahun 2024 dan 2025, data distribusi, dan data distributor) dalam minggu ini. Hasil rapat akan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

2. Rapat Evaluasi Realisasi Impor Daging Lembu Konsumsi Reguler

Rapat dilaksanakan pada tanggal 9 April 2025 melalui zoom meeting. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi realisasi impor daging lembu konsumsi reguler bersama dengan K/L terkait sebagai tindak lanjut Risalah Rakortas tanggal 12 Februari 2025. Rapat dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan dan dihadiri oleh Perwakilan Asdep Tata Niaga Perdagangan Luar Negeri Kemenko Pangan, Perwakilan Direktorat Impor Kemendag, Perwakilan 43 Pelaku Usaha yang telah mendapatkan PI tahun 2025.

Berdasarkan data Simrek Ditjen PKH Kementan, stok daging lembu per tanggal 21 Maret 2025 sebesar 34.367,91 Ton (24.713,91 Ton di importir dan 9.654 Ton di Bulog). Sinas NK menyampaikan data realisasi impor daging lembu secara total per tanggal 9 April 2025 sebesar 23.079,20 Ton (7,89% dari total PI terbit 489.111 Ton), sedangkan realisasi impor daging lembu konsumsi reguler sebesar 20.144,08 Ton (25,18% dari PI terbit 80.000 Ton). Kendala yang dihadapi saat ini adalah kenaikan tarif impor di AS, turunnya nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat yang menurun.

Pelaku Usaha meminta dukungan dari pemerintah terkait pengembangan usaha yang dilakukan dan berharap penambahan alokasi sebesar 100.000 Ton dapat segera diberikan untuk mendukung kelancaran usaha.

Rencana Tindak Lanjut: Hasil rapat akan disampaikan ke pimpinan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya, termasuk penambahan alokasi impor 100.000 Ton.

3. Pemantauan Lapang ke Gudang PT. Indogal Agro Trading

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 10 April 2025 di Sentul, Bogor. Pemantauan ini bertujuan untuk berdiskusi terkait proses impor daging lembu serta membandingkan data realisasi berdasarkan dokumen PIB dengan data realisasi di SINAS NK. Pertemuan dihadiri oleh Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas beserta staf dan Perwakilan dari PT. Indogal Agro Trading yaitu CSOO, Finance, dan HR GA beserta staf.

PT. Indogal Agro Trading memiliki gudang salah satunya wilayah Sentul dengan kapasitas 600 Ton dan mengimpor daging lembu dari negara Australia, New Zealand, dan Spanyol.

PT. Indogal Agro Trading menggunakan jasa pihak ketiga dalam mengurus dokumen PIB. Setelah dokumen PIB keluar, staf regulatory menginput data impor ke sistem LNSW sebagai laporan realisasi. Terdapat perbedaan data realisasi impor pada PT. Indogal Agro Trading dengan data Sinas NK. Berdasarkan data PT. Indogal Agro Trading, realisasi sampai 10 April 2025 sebesar 606 Ton sedangkan data realisasi di SINAS NK sebesar 381,76 Ton. Selain itu yang sedang dalam pemeriksaan karantina sebesar 292 Ton. Setelah dilakukan pengecekan data PIB, dari total 25 dokumen PIB yang dimiliki oleh PT. Indogal Agro Trading, yang sudah ada di tarikan realisasi LNSW ada 11 dokumen PIB dan 14 lainnya belum ada. PT. Indogal Agro Trading menyarankan agar laporan realisasi dapat dilakukan melalui satu pintu by sistem (tanpa diinput manual) dan Pelaku Usaha juga bisa melihat data realisasi di Sinas NK melalui sistem yang sudah ada.

Rencana Tindak Lanjut Hasil diskusi, pengecekan data realisasi, serta masukan yang didapatkan pada pertemuan ini akan dibahas lebih lanjut dengan K/L terkait yaitu LNSW untuk penyebab dan solusinya.

4. Pertemuan Updating Proyeksi Neraca Pangan Bulan April 2025

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025, bertempat di Ruang Rapat Nusantara II Kantor Badan Pangan Nasional. Pertemuan bertujuan untuk menyusun updating Proyeksi Neraca Pangan tingkat nasional dengan melibatkan Kementerian/Lembaga. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Serelia Kementan, Direktorat STO Kementan, Direktorat Bitpro PKH Kementan, Direktorat Pakan PKH Kementan, Direktorat AKABI Kementan, Pusdatin Kementan, Direktorat STPHP BPS, Direktorat Statistik Distribusi BPS, Direktorat Statistik Peternakan Perikanan dan Kelautan BPS, Direktorat Impor Kemendag, Direktorat Bina Pasar dalam Negeri Kemendag, Direktorat IKMP Kemenperin, Supply chain dan pelayanan publik Perum BULOG, serta observer dari perwakilan Bank Indonesia, Dinas Pangan Wilayah Prov. Bali, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, NTT, NTB, serta Lingkup fungsional Direktorat Ketersediaan Pangan.

Berdasarkan hasil updating proyeksi neraca pangan bulan April 2025, secara keseluruhan diperkirakan neraca/stok sampai dengan bulan April 2025 aman untuk semua komoditas.

Produksi beras dan jagung bulan Januari – Mei 2025 masih berdasarkan KSA BPS amatan Februari 2025, karena terdapat perubahan rilis data KSA dari BPS yang semula di akhir bulan menjadi awal bulan. Potensi produksi beras dan jagung bulan

Juni-Desember 2025 berdasarkan rencana produksi Ditjen Tanaman Pangan Kementan.

Harga ayam ras saat ini sedang mengalami gejolak harga di tingkat produsen, yang mana seharusnya berdasarkan HAP sebesar 25.000/kg namun saat ini hanya sebesar 12.000/kg. Hal ini disebabkan oleh produksi ayam ras nasional yang melimpah sebanyak 60-70 juta ekor/bulan sedangkan daya beli masyarakat menurun sehingga perlu adanya kebijakan lebih lanjut dari pemerintah terhadap gejolak harga.

Komoditas bawang putih dan daging sapi penugasan perlu mendapatkan perhatian karena sampai bulan april 2025 realisasi masih kecil, dimana realisasi impor impor bawang putih konsumsi sebesar 29,86% dan daging sapi/kerbau penugasan sebesar 12,04% dari PI terbit, sehingga perlu adanya percepatan realisasi impor.

Rencana Tindak Lanjut: Bapanas akan mengirimkan hasil updating Proyeksi Neraca Pangan Bulan April 2025 kepada Kementerian/Lembaga terkait. Pelaksanaan updating proyeksi neraca pangan bulan mei akan diubah pada pada akhir bulan mei dan perubahan tersebut berlaku untuk setiap bulan kedepannya.

5. Monitoring dan Koordinasi Ketersediaan Pangan di Perumda Dharma Jaya

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025 di Cakung, Jakarta Timur. Tujuan kegiatan adalah koordinasi dalam rangka pasokan dan stok di Perumda Dharma Jaya, Cakung, Jakarta Timur. Koordinasi dihadiri oleh Kadiv Penugasan, Tenaga Ahli Pangan Bersubsidi dan Ketua Pangan Bersubsidi, Kadiv Hub Logistik dan perwakilan dari Direktorat Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional.

Perumda Dharma Jaya mendapatkan pasokan daging sapi lembu impor Brazil dari PT. Berdikari, PT. Boga Maxima Indonesia, PT. Bumi Maestroayu, PT. Agro Boga Utama, PT. Suri Nusantara Jaya, dan PT. Dua Putra Perkasa Pertama. Pasokan daging ayam didapatkan dari PT. CPI, sedangkan ikan kembung banjar berasal dari Juwana, Pati, Jawa Tengah.

Perumda Dharma Jaya memiliki gudang beralamatkan di Cakung, Jakarta Timur milik pribadi, dan sewa gudang milik PT. Giat dan PT. Dua Putra Perkasa di Cipandawa. Untuk gudang yang beralamat di Cakung, Jakarta Timur terdiri dari 17 ruangan dengan kapasitas 400-500 Ton, sedangkan gudang sewaan memiliki kapasitas hingga 1.000 Ton. Stok yang dimiliki per tanggal 25 April 2025, antara lain: Daging Lembu: 635.37 Ton, dan Daging Ayam: 598,63 Ton

Rencana Tindak Lanjut : akan dilakukan update pelaporan pasokan dan stok setiap minggu/bulan untuk menghimpun informasi ketersediaan pangan di Perumda Dharma Jaya.

6. Rapat Pembahasan Pengembangan Aplikasi Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Penyusunan Laporan Updating Proyeksi Neraca Pangan Bulan April 2025

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025 di Ruang Rapat BRMP Bogor. Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan terkait kendala-kendala yang dialami pada aplikasi NBM kepada pengembang dan penyusunan laporan updating proyeksi neraca pangan bulan April 2025. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Tim Pokja Neraca Pangan Dit.KP Bapanas dan dihadiri oleh tim pengembang aplikasi NBM dan tim pokja neraca pangan.

Terdapat kendala yang dialami pada aplikasi NBM yaitu terkait perbedaan angka konversi dan formula perhitungan pada aplikasi dengan penghitungan manual. kendala tersebut ada pada bagian algoritma yang ditetapkan pada awal pengembangan, sehingga pada pengembangan berikutnya perlu di-readjustment kembali algoritma dan formula perhitungan yang digunakan pada program.

Solusi yang diusulkan oleh tim neraca pangan kepada tim pengembang yaitu adanya fitur untuk merubah angka konversi secara mandiri sehingga user (tim) dapat merubah angka konversi sendiri tanpa perlu meminta bantuan pengembang untuk merubah algoritma pada program setiap kali ada perubahan.

Tim pengembang sudah memahami kendala yang disampaikan dan bayangan rencana perbaikan yang akan dilakukan, namun perbaikan baru dapat dilakukan setelah proses administrasi tahun 2025 dimulai.

Aplikasi NBM yang saat ini masuk ke Satu Data Pangan Pusdatin untuk sementara akan dinonaktifkan terlebih dahulu (tidak dapat diakses oleh umum).

7. Rapat Pemantauan Ketersediaan Pangan di Pasar Induk Kramat Jati

Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 22 April 2025. Kegiatan bertujuan untuk menghimpun data ketersediaan pangan di pasar induk dan memantau ketersediaan pangan secara berkala. Kegiatan dilaksanakan dengan koordinasi bersama pengelola PIKJ, kemudian dilanjutkan pemantauan ke lapangan dan wawancara bersama pedagang di PIKJ.

Pasar Induk Kramat Jati melakukan pemantauan setiap pasokan dan harga yang masuk per hari dengan estimasi dan sampling, dimana pencatatan harga dilakukan pada sampel-sampel pedagang yang terpilih dengan mengambil varian medium pada setiap jenis komoditi.

Harga cabai merah keriting per 22 April 2025 Rp48.000/kg dengan rerata pasokan sebesar 20 ton, cabai merah besar (TW) Rp 32.000/kg dengan rerata pasokan

sebesar 7 ton, cabai rawit merah Rp40.000/kg dengan rerata pasokan sebesar 33 ton, cabai rawit hijau Rp15.000/kg dengan rerata pasokan sebesar 15 ton, bawang merah Rp29.000/kg dengan rerata pasokan sebesar 84 ton, dan bawang putih Rp32.000/kg dengan rerata pasokan 86 ton.

Pasokan bawang merah lokal per minggu ini sebesar 631 ton, bawang putih honan sebesar 390 ton, bawang putih kating sebesar 163 ton, cabai merah keriting 116 ton, cabai merah besar 35 ton, cabai rawit merah 153 ton, dan cabai rawit hijau 70 ton.

Hasil wawancara dengan beberapa pedagang, pasokan cabai berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan bawang merah mayoritas dari Brebes, Jawa Tengah. Untuk komoditas bawang putih pedagang mayoritas merupakan distributor pertama (D1) dengan rerata pasokan sebesar 20-50 ton dan harga beli dari importir Rp29.000.

Rencana Tindak Lanjut: Akan dilakukan update pelaporan pasokan setiap minggu/bulan untuk menghimpun informasi ketersediaan pangan di Pasar Induk Kramat Jati.

2. Kegiatan Pemantauan Ketersediaan Cabe di Batu Malang, Provinsi Jawa Timur

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025. Kegiatan bertujuan untuk mendiskusikan agribisnis komoditas cabe (potensi dan tantangan) bersama dengan ketua dan anggota AACI Provinsi Jawa Timur dan desain pendataan pola tanam dan pola panen cabe.

Pertemuan dibuka oleh Ketua Gapoktan Mitra Arjuna, dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Asosiasi Agribisnis Cabe Indonesia (AACI). Narasumber yaitu Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional. Pertemuan dihadiri oleh ketua Gapoktan Cabe se wilayah Jawa Timur di bawah keanggotaan AACI, Ketua Pokja Pengelolaan Ketersediaan Pangan dan Staf Direktorat Ketersediaan Pangan.

Petani yg tergabung dalam AACI ikut membantu pemerintah dalam pengendalian inflasi. Petani bisa menganalisa dan memprediksi kondisi harga dan panen. Petani cabe mengharapkan harga cabe dapat stabil atau naik agar petani bisa sejahtera. Pasca pandemi dan efisiensi anggaran, petani kesulitan untuk mendapatkan program bantuan pemerintah.

Ketua Asosiasi Agribisnis Cabe Indonesia (AACI) menyampaikan bahwa AACI berperan dalam membangun komunikasi dengan anggotanya maupun dengan stakeholder lainnya untuk mendiskusikan tentang harga dan membangun data cabe yg akurat dan update setiap saat. Salahsatunya membuat metode pembakuan untuk mengetahui stok tegakan bahwa stok cabe bukan di pasar melainkan ada di lahan. Selain itu potensi Kerjasama Antar Daerah (KAD) penting dimanfaatkan dimana

Jawa Timur merupakan pemasok utama terbesar cabai ke seluruh wilayah Indonesia sehingga diharapkan setiap sentra produksi cabe wilayah di Jatim siap untuk mendistribusikan cabe ke wilayah defisit.

Direktur Ketersediaan Pangan menyampaikan bahwa kondisi harga cabe yg tidak wajar ditandai dengan jarak harga di tk produsen dgn konsumen yg terlalu jauh akibat mekanisme penetapan harga yg terjadi di pasar seperti pasar pare Kediri dan PIKJ sebagai barometer harga dan stok. Untuk memotong rantai perdagangan cabe diperlukan suatu sistem pendataan pola tanam dan panen cabe yg selama ini belum dimiliki oleh AACI. Saat ini sedang disiapkan design sistem website tanpa menggunakan anggaran APBN dan nantinya website ini dikelola oleh ACCI. Apabila sistem ini nantinya sudah berjalan informasinya dapat dimanfaatkan untuk Kerjasama Antar Daerah dalam distribusi komoditas ke daerah defisit.

Gapoktan dari Kab. Kediri (Bapak Suyono) menyampaikan bahwa permasalahan cabe terjadi disaat over suplay dan kurangnya perlindungan bagi petani. Disaat kondisi tersebut, Badan Pangan Nasional hadir dan konsisten membantu disaat harga jatuh melalui program FDP sehingga diharapkan dukungan semua stakeholder terlibat dalam mengatasi permasalahan cabe. Over supply cabai merah besar akan menjadi masalah karena 80% untuk industri dan 20% untuk konsumsi. Pada saat terjadi over suplay Industri kesulitan menyerap saat harga murah karena khawatir dianggap penimbunan. Sementara untuk komoditas cabe rawit merah 80% untuk konsumsi dan 20% untuk industri, apabila terjadi jatuhnya harga bisa diatasi dengan bela beli petani. Untuk permasalahan cabe merah besar perlu solusi dan dukungan Badan Pangan Nasional untuk pemecahan masalah di Industri agar industri bisa menyerap lebih banyak saat harga murah.

Selama ini ACCI belum memiliki pendataan secara tersistem. Sistem pendataan yang dijalankan secara manual memiliki kekurangan dan kurang valid. Usulan anggota agar website AACI dibatasi akses untuk umum agar kerahasiaan data tanam dapat terjaga. Oleh karena itu, perlu di diskusikan lebih mendalam desain website terutama pembagian informasi yg bisa akses untuk umum dan internal (AACI).

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Green House milik Pak Huda selaku ketua CV. Wonosari Farm di kab. Pasuruan yang diikuti oleh anggota AACI

8. Menghadiri Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Sinergi Aksi Eliminasi Wasting di Indonesia melalui Penguatan Pelaksanaan Rencana Aksi Global Wasting

Pertemuan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 bertempat di Gedung WTC3 Jakarta. Rapat diselenggarakan oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan UNICEF. Tujuan

pertemuan adalah menyelaraskan program dan intervensi pelaksanaan peta jalan operasional rencana aksi global sesuai dengan RPJMN 2025-2029 serta indikator dalam rancangan peraturan presiden tentang pencegahan dan penurunan stunting.

Pertemuan dibuka oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas. Narasumber pertemuan terdiri dari Mamadou Ndiaye – Chief Nutrition UNICEF; Prof. Endang L. Achadi – Universitas Indonesia, Dir. Pelayanan Kesehatan Keluarga-Kemendes, Dir. SUPD III-Kemendagri. Dir Sanitasi – Kemen PU, Dir Jaminan Sosial – Kemensos, dan Dir. Pengendalian Kerawanan Pangan - Bappenas. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan Kemendagri, Kemedikdasmen, Kemendes, Kementan, BKKBN, Bappenas, Bappenas, Perwakilan Jejaring Scaling Up Nutrition, dan Perwakilan UNICEF.

Indonesia mendukung pencapaian target kesehatan dan gizi dunia pada tahun 2025 dan tujuan pembangunan berkelanjutan SDG untuk mengakhiri segala bentuk masalah gizi pada tahun 2030. Peta Jalan Global Action Plan (GAP) Wasting pada anak balita telah dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan lima badan PBB termasuk FAO, WFP, WHO, UNHCR, dan UNICEF melalui serangkaian konsultasi dengan beberapa kementerian yang dikoordinasikan oleh Bappenas. GAP saat ini merupakan perubahan dari panduan 2013 yang terbit pada tahun 2023. GAP ini merupakan pembaruan dari tata laksana WHO.

Untuk mencapai target wasting global <5% pada tahun 2025 dan 3% pada tahun 2030 dengan melakukan aksi perluasan fokus pencegahan deteksi dini dan tata laksana stunting dan wasting secara terintegrasi dan multi sektoral.

Penanganan wasting merupakan salah satu quick win Presiden. Program ini memerlukan cascading hingga ke level desa. Pentingnya sinkronisasi data untuk melakukan intervensi yang tepat dalam penanganan wasting.

Rencana Tindak Lanjut: akan terus dilakukan pengawalan terhadap upaya pencapaian target pencegahan dan penurunan wasting di tahun 2045 secara optimal.

9. Menghadiri Rapat Pembahasan Concept Notes – Establishment of ASEAN Local Resource-based Food Reserve (LRBFR)

Rapat dilaksanakan pada Kamis, 17 April 2025 melalui Zoom Meeting. Rapat bertujuan untuk melaporkan perkembangan studi ASEAN-LRBFR yang selanjutnya akan disampaikan pada pertemuan AFSRB ke-45. Rapat dipimpin oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementan serta dihadiri oleh Perwakilan Biro PKH, Dit. DCP, dan Dit. KP Bappenas, Prof. Achmad Suryana, dan Mr. Kozono dari ERIA.

ASEAN LRBFR merupakan sebuah inisiasi yang diadopsi pada ASEAN Leaders' Declaration untuk memperkuat ketahanan pangan dan gizi sebagai respon pada

krisis atau bencana. Terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam Concept Notes ASEAN LRBFR yaitu:

- Keanggotaan ASEAN LRBFR ini terbatas pada negara anggota ASEAN, namun kemungkinan dapat menerima kontribusi dari negara non-ASEAN
- Cadangan pangan akan mencakup berbagai komoditas, seperti biji-bijian, kacang-kacangan, daging, produk olahan, dan makanan siap saji. Negara anggota ASEAN juga dapat melakukan penilaian terhadap ketersediaan sumber daya pangan lokal untuk menentukan komoditas yang cocok sebagai cadangan.
- Mekanisme operasional ASEAN LRBFR melibatkan pembentukan sekretariat untuk mengelola operasional. Negara anggota ASEAN akan berkontribusi dengan pangan atau dana.
- Mekanisme pengeluaran bantuan pangan memungkinkan negara yang menghadapi krisis untuk meminta bantuan melalui sekretariat yang akan menentukan jenis, jumlah, dan persyaratan distribusi.
- Mekanisme operasional dan distribusi ini juga dapat mempelajari kerangka dalam APTERR, namun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan hasil diskusi pada ASEAN Meeting.
- Rencana Tindak Lanjut: Biro PKH akan mengkonfirmasi kembali terkait kehadiran Bapanas pada AFSRB karena adanya efisiensi anggaran apabila tidak memungkinkan dilakukan secara hybrid

10. Menghadiri Rapat Pembahasan dan Sinkronisasi Data Realisasi Impor

Rapat dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025 di kantor LNSW. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan pengecekan data realisasi berdasarkan dokumen PIB yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dan yang tercantum pada Sinas NK. Rapat dipimpin oleh Direktur Pengelolaan Layanan Data dan Kemitraan LNSW dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Ketersediaan Pangan Bapanas dan Perwakilan PT. Indogal Agro Trading.

Berdasarkan hasil pemantauan ke gudang PT. Indogal Agro Trading, terdapat ketidaksesuaian antara data realisasi yang tercantum di Sinas NK dengan data realisasi dari dokumen PIB yang ada. Setelah dilakukan pengecekan oleh pihak LNSW, ketidaksesuaian data tersebut dikarenakan pada saat mengajukan PIB tidak melampirkan dokumen persetujuan impor (PI) sehingga sistem tidak dapat menarik data tersebut. Setelah dikonfirmasi, PT. Indogal Agro Trading menggunakan jasa pihak ketiga/PPJK dalam proses pengajuan PIB.

Rencana Tindak Lanjut: PT. Indogal Agro Trading akan berkoordinasi dengan pihak ketiga/PPJK mengenai hasil pertemuan ini sehingga diharapkan kedepannya data realisasi di Sinas NK sesuai dengan dokumen PIB yang dimiliki.

11. Menghadiri Rapat Teknis Persiapan Rakor Pengendalian Inflasi Wilayah Sumatera

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 melalui zoom meeting. Pertemuan ini bertujuan untuk pembahasan rencana pokok-pokok substansi yang akan disampaikan pada Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sumatera. Pertemuan dibuka oleh perwakilan Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, dan dihadiri oleh Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Makanan Bergizi Wilayah III Badan Gizi Nasional, Perwakilan Biro Perencanaan Kementan, dan Perwakilan Perum BULOG.

Rakor TPIP-TPID Wilayah Sumatera diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti komitmen High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) yang akan dilaksanakan di Medan pada 24 April 2025.

Substansi yang akan dibahas dalam rakor yang berkaitan dengan Bapanas, antara lain penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memperlancar distribusi pangan. Bapanas juga mendorong penyusunan neraca pangan di seluruh wilayah hingga di tingkat Kab/Kota, neraca pangan menjadi salah satu instrument yang dibahas di rapat inflasi terkait pengendalian volatility food. Selain itu, data neraca pangan wilayah dapat menjadi data dasar untuk melakukan pemetaan kebutuhan dan ketersediaan pangan antar daerah dalam rangka mendukung fasilitasi dan optimalisasi KAD guna mendukung program MBG.

Rencana tindak lanjut: Matrik pembahasan rakor akan disesuaikan Kembali dengan masukan stakeholder.

12. Menghadiri Rapat Koordinasi Komunikasi Panen Raya (Dalam Jaringan)

Rapat dilaksanakan pada Selasa, 22 April 2025 melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas strategi komunikasi terkait panen raya untuk menunjukkan update capaian kinerja pemerintah khususnya di bidang pangan dan pertanian. Rapat dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Presiden dan dihadiri oleh Perwakilan Kemenko Pangan, Kementan, Komdigi, KemenPU, KemenBUMN, Bapanas, TNI, Bulog, ID Food, serta Pupuk Indonesia.

Aksi Nyata Menuju Sejahtera untuk bidang pangan berfokus pada Panen Raya Penyerapan Gabah 3 Juta Ton Glorifikasi panen raya di sosial media dapat dilakukan

dengan membuat konten yang berisi dampak nyata terhadap petani. Bapanas disarankan untuk membuat strategi komunikasi dengan pesan kunci yaitu Kepastian HPP Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500/kg merata oleh setiap pembeli gabah petani sehingga pendapatan petani lebih adil.

Strategi komunikasi ini perlu dilakukan untuk menginformasikan capaian kinerja pemerintah kepada seluruh masyarakat serta untuk memberikan berita-berita baik yang membangun optimisme dari maraknya isu-isu global.

Rencana Tindak Lanjut: Kantor Komunikasi Presiden akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap strategi komunikasi pada setiap bidang.

13. Menghadiri Forum Komunikasi Perencanaan Lintas Sektor Dalam Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja

Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring pada hari Kamis, 24 April 2025 bertempat di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Kegiatan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan kebijakan ketahanan pangan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kerja; dan membangun sinergi antara Kementerian, Lembaga, dan Asosiasi Industri dalam merumuskan langkah strategis untuk implementasi kebijakan ketahanan pangan.

Pertemuan dibuka oleh Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, dengan narasumber Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Kepala Biro Perencanaan Badan Pangan Nasional, dan Kepala Pusat Riset dan Teknologi dan Proses Pangan BRIN. Peserta Pertemuan terdiri dari perwakilan Bappenas, Kementan, KKP, Kemendag, BKPM, BRIN, Bapanas (Dit KP), Perum Bulog, dan Jajaran lingkup Kementerian Ketenagakerjaan.

Indonesia sebagai negara besar masih menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan ketenagakerjaan yg masih kompleks, seperti besarnya pengangguran terbuka, masih rendahnya kualitas dan produktivitas kerja serta hubungan industrial yg kurang harmonis. Berbagai program pelatihan telah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan maupun K/L lainnya namun dirasakan belum mampu mewadahi semua keseluruhan angkatan kerja yg tersedia. Untuk mengoptimalkan potensi yg ada diperlukan kerjasama lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah dalam memperkuat daya saing tenaga kerja.

Penanganan ketenagakerjaan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai sektor dengan melibatkan peran pemerintah dan swasta. Menuju kearah tersebut perlu adanya road map perencanaan ketenagakerjaan sebagai pedoman bagi pusat dan daerah dalam peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja sehingga bisa berdaya saing

tinggi di semua sector. Oleh karena itu, pentingnya membangun sinergi antar K/L dalam merumuskan berbagai langkah strategis untuk implementasi kebijakan ketahanan pangan yg dapat mendukung pertumbuhan sektor industri dan penyediaan tenaga kerja

Rencana Tindak Lanjut : hasil pertemuan forum komunikasi ini menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan di bidang pangan. Akan dilakukan kegiatan yg sama untuk membahas ketenagakerjaan di sektor energi dan industri.

14. Menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Swasembada Beras Nasional

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025 melalui zoom meeting. Pertemuan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi kebutuhan beras konsumsi Nasional yang berkaitan dengan kebutuhan benih untuk penanaman padi dalam mendukung strategi produksi beras Nasional dan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat dalam swasembada beras tahun 2025. Pertemuan dipimpin oleh Asdep Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan Kemenko Pangan dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pertanian, perwakilan BRIN, perwakilan PT Sang Hyang Seri, dan perwakilan Dit.KP BAPANAS.

Berdasarkan data potensi produksi beras Nasional tahun 2025 (KSA update April 2025, BPS), Indonesia tahun 2025 dapat memenuhi kebutuhan konsumsi beras Nasional tahun 2025 dengan surplus sekitar 1,3 juta ton (kurang dari 1 bulan kebutuhan) dan berdasarkan data proyeksi neraca pangan update April 2025, Indonesia memiliki neraca/stok beras akhir Tahun 2025 sebesar 10,23 juta ton yang dapat menjadi Cadangan untuk 4 bulan kedepan setelah akhir tahun 2025.

Upaya swasembada pangan khususnya beras Nasional, Kemenko Pangan menyampaikan adanya target sasaran luas tanam padi sekitar 20 juta ha dengan sasaran OPLA – cetak sawah dll seluas 3.004.615 ha dengan kebutuhan benih 120.185 ton (Kebutuhan benih per hektar: 40 kg/ha).

Kebutuhan Benih Bersertifikasi TA 2025 dengan target luas lahan tanam seluas 20 juta ha sekitar 545.313 ton (asumsi produksi benih 3 ton/ha). Dengan data tersebut, maka masih terdapat kekurangan benih penangkaran untuk lahan seluas 110.947 ha.

PT. SHS menargetkan produksi beras Tahun 2025 sebesar 13 ribu ton sampai dengan bulan Juni. SHS optimis akan mencapai target ini dengan menggunakan benih dari Kementan.

Tindak lanjut: Kemenko Pangan akan melakukan rapat lanjutan untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh oleh K/L terkait.

15. Menghadiri Rapat Koordinasi Realisasi Impor Bawang Putih

Rapat dilaksanakan pada Kamis, 24 April 2025 melalui Zoom Meeting. Rapat ini bertujuan untuk membahas penyebab perkembangan harga bawang putih yang terus meningkat dan realisasi impor yang masih rendah. Rapat dibuka oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dan Direktur SPHP Bapanas serta dihadiri oleh Direktur Impor Kemendag, Perwakilan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Perwakilan Ditjen Hortikultura Kementan, Perwakilan Direktorat Ketersediaan Pangan Bapanas, Perwakilan Dinas Provinsi yang menangani urusan Pangan, dan Importir Bawang Putih.

Berdasarkan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tanggal 21 April 2025, perkembangan harga bawang putih saat ini menjadi perhatian karena tren yang terus meningkat diatas 15% HAP dengan realisasi impor baru mencapai 31,35% (70.874 ton) dari total PI 226.101 ton sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk stabilisasi harga bawang putih.

Kementan telah melakukan verifikasi terhadap 87 perusahaan sesuai dengan penetapan NK bawang putih tahun 2025 sebesar 550.000 Ton. Selain itu, Kementan menghimbau kepada perusahaan yang telah mendapatkan SPI untuk segera melakukan realisasi tanam.

Kemendag telah menerbitkan SPI per 24 April sebesar 315.889 Ton untuk 51 perusahaan dan telah melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kepada importir secara rutin. Rencana importasi dari importir bawang putih yang akan tiba sepanjang bulan April sebesar 28.375 Ton dan Mei sebesar 15.515 Ton.

Berdasarkan informasi Dinas Pangan Provinsi, pasokan bawang putih di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah tergolong aman/cukup tersedia. Namun harga rata-rata bawang putih memang cenderung tinggi karena harga dari distributor sudah tinggi.

Pihak importir menyampaikan bahwa realisasi impor saat ini dilakukan secara bertahap mengikuti proses bisnis di perusahaan masing-masing. Selain itu, penyebab harga bawang putih nasional tinggi dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dollar yang saat ini melemah, karena pembelian bawang putih dari Cina menggunakan dollar dan importir tidak ingin mendapat kerugian. Wilayah tujuan distribusi masih mencakup Pulau Jawa dan Sumatera, sehingga perlu ada diskusi lanjutan agar disparitas harga terutama di wilayah Indonesia Timur tidak terlalu jauh.

Satgas Pangan dan stakeholder terkait akan terus memantau realisasi dan distribusi bawang putih ke pasar-pasar untuk menjaga perkembangan harga.

Rencana Tindak Lanjut: Monitoring dan evaluasi realisasi impor bawang putih akan terus dilakukan dalam rangka menjaga pasokan dan stabilisasi harga bawang putih di dalam negeri.

16. Menghadiri Pertemuan Taksasi Produksi Awal Giling Tahun 2025

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025 di Ruang Rapat Ditjen Perkebunan, Kementan. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang perkiraan produksi Gula Kristal Putih (GKP) pada awal giling Tahun 2025 dari setiap PG yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, sebagai bahan penyusunan Neraca Komoditas Gula dan sebagai bahan pengambilan kebijakan tentang pergulaan nasional tahun 2025. Pertemuan dibuka oleh Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Perkebunan dan dihadiri oleh perwakilan Kementan, perwakilan BAPANAS, pimpinan Pabrik Gula atau yang mewakili, dan Ketua/perwakilan GAPGINDO.

Pada Tahun 2025 jumlah PG yang aktif sebanyak 57 PG dengan musim giling tahun 2025 diperkirakan dimulai pada bulan Mei dan berakhir pada bulan September-Oktober. Berdasarkan hasil analisis dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, diprediksi produktivitas tebu pada tahun 2025 meningkat menjadi 71,25 ton/ha atau 11,72% dibandingkan tahun lalu (63,78 ton/ha). Namun diprediksi terjadinya penurunan rendemen pada tahun 2025 menjadi 7,29% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,42%. Produksi tebu tahun 2025 merupakan hasil tanaman tahun 2024. Prediksi penurunan persentase rendemen ini karena terkendala pada tahapan kemasakan tebu/pengisian gula pada tanaman tebu yang akan dipanen pada tahun 2025 yang disebabkan oleh durasi musim kemarau yang lebih pendek pada tahun 2025. Selain itu, adanya gangguan potensi La Nina pada akhir tahun 2025 yang mana banyak tanaman tebu yang merupakan periode tengah yang membutuhkan musim kemarau untuk kemasakan tebu.

Data taksasi produksi awal giling tahun 2025 telah disepakati oleh perwakilan PG BUMN dan PG swasta adalah Produksi tebu: 37.857.529,02 Ton dengan rata-rata 70,35 ton/ha, Rendemen: 7,66%, dan Hasil GKP: 2.901.764,75 Ton atau rata-rata 5,39 ton/ha.

Rencana Tindak lanjut: Hasil taksasi produksi awal giling tahun 2025 yang telah disepakati pada rapat ini akan dimasukkan ke dalam perhitungan proyeksi neraca pangan nasional tahun 2025.

17. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Perubahan Perizinan Impor Gula Kristal Mentah

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kemenko Bidang Pangan pada tanggal 25 April 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk menindaklanjuti surat Direkur Utama PT. RNI perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kedatangan Importasi Gula Kristal Mentah (GKM). Pertemuan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan dan dihadiri oleh Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, perwakilan Dirjen Perkebunan Kementan, Direktur Impor Kemendag, Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW dan perwakilan Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk KemenBUMN.

Kementan menyampaikan terdapat kesepakatan awal giling tahun 2025 dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah sentra tebu, bahwa awal giling tahun 2025 di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025. Oleh karena itu apabila terdapat keterlambatan kedatangan GKM, sebaiknya tidak melebihi tanggal tersebut agar tidak mempengaruhi psikologis petani tebu.

Bapanas perlu mengontrol distribusi/penyaluran GKP hasil olah dari GKM, dikarenakan pengadaan GKM tersebut adalah dalam rangka CPP.

PT. RNI/ID FOOD menyanggupi kedatangan GKM sebelum 16 Mei 2025, sehingga disepakati Perubahan PI pada uraian barang yang semula tercantum batas akhir pemasukan GKM sampai dengan 30 April 2025 menjadi sampai dengan 16 Mei 2025.

Sesuai dengan Permendag 8/2024, bahwa perubahan PI GKM untuk diolah menjadi GKP dapat dilakukan dalam hal perubahan uraian barang, dimana dalam hal ini waktu pemasukan terdapat pada uraian barang. Sesuai dengan Perpres 61/2024 Jo. Perpres 7/2025, dalam hal perubahan waktu pemasukan, pelaku usaha menyampaikan usulan perubahan NK melalui Sinas NK. Setelah penetapan perubahan NK, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perubahan PI.

Rencana Tindak Lanjut: PT. RNI/ID FOOD akan menyampaikan usulan perubahan NK dalam hal perubahan waktu pemasukan yang terdapat di uraian barang melalui Sinas NK setelah penetapan perubahan NK.

18. Menghadiri Rakornis Monitoring Implementasi Neraca Komoditas Daging Lembu

Rapat dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 di Kantor Kemenko Bidang Pangan. Pertemuan ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan NK daging lembu tahun 2025 dengan K/L terkait. Pertemuan ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Dirjen PKH Kementan, Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Direktur Kesmavet Kementan, Direktur

IMHLP Kemenperin, Direktur PLDK LNSW, Direktur Impor Kemendag, Perwakilan Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk KemenBUMN, Perwakilan PT. Berdikari, dan Perwakilan PT. PPI.

Arahan Bapak Presiden untuk pembebasan kuota impor, akan dilakukan pembahasan deregulasi impor. Disepakati bahwa pembatasan alokasi impor tetap diperlukan untuk mendukung Program Asta Cita swasembada pangan, namun deregulasi harus mempermudah Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan surat Dirjen PKH Kementan No. 15030/PI.500/F/04/2025 tanggal 15 April 2025 perihal usulan perubahan NK Daging Lembu, terdapat pengajuan yang sudah lolos verifikasi teknis di Kementan sebagai berikut: a) 12.971,81 Ton daging sapi/kerbau konsumsi, b) 10.000 Ton daging sapi/kerbau industri; c) 362.300 ekor sapi/kerbau bakalan.

Usulan perubahan NK akan dipertimbangkan untuk sapi/kerbau bakalan dan daging sapi/kerbau industri, dengan pertimbangan bahwa usulan penambahan sapi/kerbau bakalan dimaksudkan untuk menambah populasi dan seluruh produknya bisa menjadi nilai tambah dan usulan penambahan daging industry untuk memenuhi kebutuhan industri, sedangkan usulan penambahan daging sapi/kerbau konsumsi belum disetujui, karena realisasi impor daging konsumsi reguler dan penugasan BUMN masih relatif rendah, masing-masing 37,88% dan 4,37% dari PI terbit.

Kementan mengusulkan pemasukan sapi potong dan sapi perah dari negara Brazil, yang dalam hal ini pemasukannya mengacu pada PP No. 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Badan Pangan Nasional mengusulkan agar penambahan alokasi impor daging lembu konsumsi reguler sebesar 100.000 Ton kepada pelaku usaha dilakukan setelah realisasi impor alokasi 80.000 Ton mencapai 50%. Terkait hal tersebut, Kemenko Bidang Pangan memberikan arahan agar tetap mengacu pada Risalah Rakortas tanggal 12 Februari 2025.

Mengenai verifikasi jumlah/volume daging lembu konsumsi reguler, Badan Pangan Nasional mengusulkan agar kewenangan verifikasi dialihkan dari Badan Pangan Nasional kepada Kementan/Kemendag. Terkait hal ini, disarankan agar setiap biro hukum dari masing-masing K/L terkait dapat mendalami regulasi yang ada terlebih dahulu agar tidak salah dalam memberi kewenangan.

Rencana tindak lanjut: Hasil rapat akan dibahas kembali pada Rakortas Tingkat Menteri yang rencananya dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Mei 2025.

19. Menghadiri Rapat Penyusunan Neraca Bahan Makanan Provinsi Banten.

Pertemuan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 bertempat di kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis terkait penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), serta melakukan koordinasi dengan dinas teknis terkait guna memastikan ketersediaan dan konfirmasi data yang dibutuhkan dalam penyusunan NBM tersebut.

Pertemuan dibuka oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dan dihadiri oleh narasumber yaitu Ketua Tim Pokja Neraca Pangan Direktorat Ketersediaan Pangan Bapanas, serta dihadiri oleh perwakilan Dinas Ketahanan Pangan masing-masing Kab/Kota di Provinsi Banten, perwakilan Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan BPS Provinsi Banten.

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu instrumen penting untuk menilai dan mengevaluasi ketersediaan pangan di suatu wilayah dan menjadi salah satu indikator kinerja terkait ketersediaan pangan di Provinsi Banten.

Dalam bimtek disampaikan tata cara penyusunan NBM baik dalam tabel NBM maupun di sistem aplikasi SINBM, serta penyampaian perbedaan format tabel terbaru yang lebih disederhanakan.

Kendala utama yang dihadapi baik provinsi maupun kab/kota terkait penyusunan NBM antara lain ketersediaan data yang terbatas pada komoditas tertentu, serta data dari aspek perdagangan antar wilayah yang sulit didapatkan.

BPS Provinsi Banten menyampaikan bahwa distribusi pangan di Provinsi Banten melibatkan aktivitas pemasukan dan penjualan ke luar daerah. Sehingga data barang masuk dan barang keluar akan lebih akurat jika dilihat dari lalu-lintas barang melalui jembatan timbang. Sementara itu, data dari pelabuhan kurang tepat karena barang yang tercatat keluar atau masuk belum tentu digunakan atau dikonsumsi di dalam provinsi.

Rencana Tindak Lanjut: Provinsi Banten akan menyusun NBM berdasarkan data tahun 2024. Rencana rapat lanjutan pada akhir tahun untuk mengevaluasi penyusunan NBM tahun 2024 dan menyusun NBM tahun 2025.

b) Direktorat Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan

1. Uji petik BPKP Penyaluran SPHP Beras TW III dan IV 2024 Provinsi Jawa Tengah
Pendampingan Uji Petik Reviu SPHP Beras TW III dan IV 2024 di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 14 – 18 April 2025. Uji Petik merupakan

tindak lanjut surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Nomor 77/PW.02.04/B/01/2025 hal Permohonan reviu SPHP Beras TW III dan IV Tahun 2024 berdasar Surat Direktur Utama Perum BULOG tanggal 15 Januari 2025 Nomor B-47/II/DP102/LR.04/01/2025 perihal Permohonan Reviu Realisasi Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen TW III dan IV Tahun 2024.

Uji petik Reviu SPHP Beras TW III dan TW IV 2024 dilakukan oleh Tim BPKP Pusat dan BPKP Perwakilan daerah, dengan rincian sebagai berikut: a) BPKP Pusat meliputi 4 Provinsi (Jawa Tengah, Bali, Sulut, Aceh); dan b) BPKP Perwakilan daerah meliputi 5 Provinsi (Sumut, Jambi, Kalsel, Maluku Utara, NTT). Uji petik selanjutnya dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 22 – 25 April 2025. Catatan dari uji petik BPKP yang perlu diperhatikan adalah keselarasan dan kelengkapan dokumen serta penguatan monev.

2. Rakor Perhitungan HPP Gabah dan/atau beras

Rakor Perhitungan HPP GKG dan/atau Beras dan HET Beras dilaksanakan pada Selasa, 22 April 2025 di secara hybrid di Ra Suite Hotel Simatupang Rakor dipimpin oleh Kepala Badan Pangan Nasional dan dihadiri oleh Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP, Ombudsman RI, Deputi KSP Bapanas, Asdep Pangan, Pertanian dan Gizi Kemensetneg, Direktur KP Bapanas, Ketua PERPADI, Ketua SPI, Ketua KOPPIC, Kepala Dinas Pangan atau yang mewakili, Perwakilan Kemenkeu, Perwakilan Kementan, Perwakilan Kemendag, Perwakilan BPS, Perwakilan Perum BULOG serta Pelaku Usaha Perberasan lainnya. Rakor merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi tanggal 17 April 2025 serta TL dari Inpres 6/2025. Tujuannya untuk menganalisa dan mengevaluasi melalui dengar pendapat dari K/L dan Pelaku Usaha mengenai perhitungan harga GKG saat ini selain itu, sebagai antisipasi untuk mempercepat serapan BULOG saat panen raya. Tindak lanjut pertemuan akan dilakukan kompilasi dan simulasi harga GKG dan HET Beras Hasil dari simulasi harga akan dibahas ke rapat yang lebih tinggi (rakortas/ratas).

3. Pendampingan Reviu BPKP Penyaluran Beras SPHP TW III dan IV 2024 Sulawesi Utara

Uji petik diikuti oleh Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim Pemeriksa BPKP, Ketua Tim Stabilisasi Harga Bapanas, perwakilan Dinas Pangan Provinsi

Sulawesi Utara, Perum BULOG (perwakilan Divisi OPP dan Kanwil Sulut dan Gorontalo).

Pengiriman beras SPHP tidak sesuai dengan PO, jumlah pengiriman ditentukan oleh Perum BULOG sesuai dengan ketersediaan, dengan tujuan pemerataan volume. Diharapkan data PO dan DO selaras.

Dokumen penyaluran dan pertanggungjawaban keuangan harus valid dan selaras antara dokumen yang diunggah ke tim rewiu, dokumen yang dibuat dan dimiliki penyalur, dan dokumen yang diarsipkan oleh Bulog. Penjualan ke pengecer pada umumnya tidak dikenakan pajak, namun untuk BUMN biasanya ada pungutan pajak, sehingga perlu diperhatikan kembali pembayaran dengan RNI.

4. Reviu HAP Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras

Rakor dipimpin direktur SPHP dan dihadiri oleh Deputi II bidang perekonomian dan pangan KSP, Asdep peningkatan daya saing produk peternakan kementerian pangan, perwakilan ombudsman, perwakilan kemendag, perwakilan satgas pangan POLRI, pelaku usaha daging ayam dan telur ayam ras.

Rakor merupakan tindak lanjut dari pertemuan di dirjen PKH Kementan tanggal 11 april 2025 dan Rakor di kementerian pangan tanggal 17 april 2025 sebagai upaya stabilisasi harga khususnya komoditas LB dan salah satu poin penting rapat yaitu perlunya rewiu kembali terkait HAP di produsen dan konsumen untuk komoditas LB dan telur.

Tindak Lanjut: Badan Pangan Nasional akan mengundang tim teknis untuk melakukan perhitungan cost structure dan memastikan biaya masih relevan atau tidak serta evaluasi agar bisa efektif lagi. Badan Pangan Nasional akan bersurat ke kementerian pangan untuk melakukan rakornis terkait program bantuan stunting guna penyerapan daging ayam ras di peternak.

5. Rakor Realisasi Impor Bawang Putih

Rapat dilaksanakan secara daring dipimpin oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, dihadiri oleh Direktur Impor Kemendag, Direktur SPHP Bapanas, perwakilan Dit. STO Kementan, Dit. Bina Pasar Kemendag, Dit. Ketersediaan Pangan Bapanas, Dit. DCP Bapanas, Dinas yang menangani urusan

pangan Provinsi Selindo, Ketua Umum Pusbarindo, serta pelaku usaha impor bawang putih.

Tujuan dilaksanakan rapat untuk membahas harga bawang putih yang saat ini cenderung naik dengan realisasi impor yang masih rendah.

Kementan menyampaikan saat ini bawang putih sudah masuk NK sebesar 550rb ton, dan telah diverifikasi. Terdapat 87 perusahaan impor yang telah terverifikasi dan ditetapkan RIPH pada Januari 2025.

Kemendag menyampaikan bahwa 315,89 ton PI bawang putih sudah diterbitkan. Namun realisasi masih rendah baru sebesar 78.772 ton (22,34%). Total terdapat 51 perusahaan yang sudah terbit PI.

Pengusaha importir bawang putih menyampaikan realisasi impor yang masih relatif rendah. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya harga beli yang masih fluktuatif karena menyesuaikan kurs dollar.

Tindak lanjut: perlu dilakukan pertemuan langsung dengan semua stakeholder untuk pembahasan yang lebih intensif.

6. Perkembangan Harga Pangan

Harga rata-rata nasional komoditi tingkat produsen pada April 2025 untuk komoditas yang aman yaitu Gabah Kering Panen Tingkat Petani, Beras Medium Tingkat Penggilingan, Bawang Merah, Cabai Merah Keriting Tingkat Petani, Cabai Rawit Merah Tingkat Petani, dan Gula Konsumsi Tingkat Produsen. Komoditas yang berada pada status waspada yaitu Ayam Ras (17,6%<HAP), Jagung Pipilan Kering Tingkat Peternak (12,58%<HPP), Telur Ayam ras (8,41%<HAP), dan Sapi (hidup) (6,25%>HAP). Komoditas yang termasuk intervensi yaitu Kedelai Biji Kering (15,4%<HAP) dan Gabah Kering Giling Tingkat Penggilingan (4,31%<HPP).

Komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di bawah HAP/HPP pada M1-M4 April 2025 yaitu GKG Penggilingan, Beras Medium Penggilingan, Jagung Pipilan Kering, Kedelai Biji Kering, Bawang Merah, cabai Rawit Merah, Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras. Adapun komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di atas HAP/HPP (kondisi membaik) pada M1-M4 April 2025 yaitu Cabai Merah Keriting.

Harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis tingkat konsumen selama April 2025. Komoditas yang termasuk perlu diintervensi yaitu Beras Premium Zona 3 (12,70%>HET), Beras Medium Zona 2 (7,54%>HET), Beras Medium Zona 3 (17,08%>HET), Bawang Putih Indonesia Timur dan 3TP (35,65%>HAP), Daging Kerbau Beku (34,41%>HAP), dan Minyakita (12,31%>HET). Komoditas yang termasuk waspada yaitu Beras Premium Zona 2 (4,69%>HET), Beras Medium Zona 1 (5,00%>HET), Bawang Putih (15,94%>HAP), Cabai Rawit Merah (36,73%>HAP), Gula Konsumsi (5,30%>HAP). dan Gula Konsumsi wilayah Indonesia Timur & 3TP (8,61%>HAP). Adapun komoditas lainnya termasuk aman.

Berdasarkan perkembangan harga komoditas tingkat konsumen yang berada di atas HAP/HET pada M5 April 2025, dapat terlihat wilayah dengan harga rata-rata berada di atas HAP/HET yang menunjukkan mengalami peningkatan pada M5 April 2025 terjadi pada komoditas Cabai Merah Keriting, Daging Sapi Murni, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras. Pantauan pada M5 April 2025, terdapat 268 Kab/Kota di Atas HAP Cabai Merah Keriting, terdapat 151 Kab/Kota di atas HAP Daging Sapi Murni, terdapat 394 Kab/Kota di atas HAP Cabai Rawit Merah dan terdapat 130 Kab/Kota di atas HAP Daging Ayam Ras dan terdapat 156 Kab/Kota di atas HAP Telur Ayam Ras.

7. Monev SPHP Pasca HBKN Idulfitri

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPHP Pasca HBKN Idulfitri, pemantauan dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, Kep. Riau, Sumsel, Bali, Sulsel. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 09 – April 2025 Sasaran pemantauan Gudang BULOG, Pasar Tradisional, Retail Modern, dan Kantor Pos. Hasil pemantauan dilaporkan ke Badan Pangan Nasional.

8. Rakor Inflasi Kemendagri

Rapat koordinasi Inflasi dilaksanakan secara rutin sekali seminggu yang dipimpin oleh Mendagri, dihadiri langsung narasumber dari Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala BPS, Deputi Basarnas, Dirjen Kemendag, Deputi KSP, Direktur SPHP Bapanas, serta dihadiri secara daring oleh Perum Bulog, Satgas Pangan POLRI, Mabes TNI, dan Kejaksaan Agung.

Inflasi bulan ke bulan (April 2025 terhadap Maret 2025) tercatat 1,17% (mtm) dengan 1,95% (yoy) dengan komoditas pangan utama penyumbang inflasi antara lain Bawang Merah (0,06%), Cabai Merah (0,04%), Tomat (0,03%), Bawang Putih (0,02%), dan Jeruk (0,02%). Sedangkan komoditas yang meredam inflasi April 2025 pada kelompok ini adalah komoditas Cabai Rawit, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras. Secara historis lima tahun terakhir, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau mengalami inflasi di setiap bulan April, kecuali pada April 2024.

9. Rapat Pembahasan Pertukaran Data antara Bapanas dengan BMKG

Rapat Pembahasan Lanjutan Dokumen Nota Kesepahaman Bersama dan PKS antara Bapanas dengan BMKG yang dilaksanakan secara hybrid di RR bertempat di ruang rapat Nusantara II Lantai 4, Badan Pangan Nasional.

Rapat dipimpin oleh Kapusdatin Bapanas dan dihadiri oleh perwakilan masing-masing direktorat Bapanas, dan dihadiri online oleh perwakilan BMKG (Direktorat Meteorologi Publik, Direktorat Informasi Iklim Terapan, Direktorat Informasi Perubahan Iklim, Direktorat Data dan Komputasi, Direktorat Sistem Jaringan dan Komunikasi dan Biro hukum, Humas dan Kerja Sama).

Rapat merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya pada 7 Maret 2025. Pembahasannya seputar MoU dan PKS. Terdapat usulan untuk menggabungkan beberapa lampiran data kebutuhan informasi BMKG yang bisa disatukan. Kemudian finalisasi jenis kebutuhan data yang diminta oleh Bapanas untuk analisis.

Data yang dibutuhkan oleh Direktorat SPHP dari BMKG, yaitu data historis curah hujan berupa data dasarian, mingguan, dan bulanan, cakupan wilayah Indonesia dengan format CSV (satuan Grid sampai dengan 5km²) dan perkembangan musim berupa zona musim lintas administrasi (ada sebanyak 699 zona musim di Indonesia) dengan format excel/peta yang akan diberikan setiap 10 hari sekali (tanggal 2, 12, 22). BMKG juga membutuhkan data dari Bapanas. Data yang dibutuhkan, yaitu harga tingkat konsumen dan produsen. Rangkaian rapat ditindaklanjuti sebagai finalisasi draft PKS antara Bapanas selaku Pihak Pertama dengan BMKG selaku Pihak Kedua.

10. Perkembangan pelaksanaan GPM Pusat dan daerah

Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah (SPHP GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta kali pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut: Pusat sebanyak 31 kali, provinsi sebanyak 306 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 1394 kali pelaksanaan. Pelaksanaan GPM dari Bulan Januari-April 2025 sebanyak 2.821 kali dengan rincian Pusat sebanyak 46 kali, Provinsi sebanyak 418 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 2.171 kali baik menggunakan anggaran APBN Pusat, Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri.

11. Perkembangan Penyaluran Beras SPHP

Beras SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan menggunakan skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET beras medium Rp12.500/kg untuk wilayah zona I. Sehubungan dengan telah berakhirnya OP Pangan Murah di Bulan Maret 2025 maka untuk sementara waktu penyaluran Beras SPHP selama bulan April 2025 dihentikan sampai ada keputusan yang baru melalui rakortas.

12. Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan OP Pangan Murah HBKN Puasa-Idul Fitri 2025

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Operasi Pasar (OP) Pangan Murah HBKN Puasa-Idul Fitri 2025 yang dilaksanakan secara *online* pada tanggal 22 April 2025. Rapat dipimpin Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, dihadiri oleh Deputi II Bidang Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Direktur SPHP, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian, dan perwakilan kementerian/lembaga dan pelaku usaha.

Badan Pangan Nasional, Kementerian/Lembaga dan pelaku usaha mengapresiasi PT POS Indonesia dalam pelaksanaan Operasi Pasar Pangan Murah yang terlaksana secara masif di seluruh Indonesia.

Realisasi Pelaksanaan OP Pangan Murah periode HBKN Puasa-Idul Fitri 2025 terlaksana di 3.754 titik dari total target 6.845 titik (54.84%) yang tersebar di 37 Provinsi dan 419 Kab/Kota.

Realisasi volume penjualan untuk 5 komoditas utama masih jauh dari target yang diharapkan (Minyakita realisasi 600.657 liter atau 0,77% dari target 70.000 ton,

Bawang Putih 5.176 kg atau 0,03% dari target 20.000 ton, Gula konsumsi 573.806 atau 1,15% dari target 50.000 ton, Daging kerbau beku 41.944 kg atau 0,22% dari target 19.000 ton dan Beras SPHP 1, 33% dari target 150.000 ton).

13. Perkembangan FDP

Kegiatan SPHP FDP berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan/*packing* (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Pemberian FDP akan meningkatkan penerimaan produsen karena produsen tidak mengalokasikan biaya transportasi dan/atau kemasan/*packing*. Sementara itu, akses konsumen akan meningkat dalam memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah dan wajar.

Komoditas pangan yang dapat diintervensi melalui kegiatan SPHP FDP antara lain gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai awit merah, sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau, ayam ras atau daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan/atau komoditas pangan lainnya.

Realisasi penyaluran bahan pangan melalui SPHP FDP selama bulan April 2025 sudah terealisasi sebanyak 6.000 kg untuk komoditas beras. Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan sampai dengan tanggal 30 April 2025 sudah terealisasi sebanyak 71.225 kg. Komoditas dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu beras sebanyak 70.655 kg. Hal ini dapat dilihat pada gambar 25.

14. Perkembangan Kios Pangan

Kios Pangan merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan kemudahan aksesibilitas pangan yang murah dan berkualitas melalui outlet Kios Pangan setiap hari sebagai bentuk intervensi dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi pangan.

Keberadaan Kios Pangan diharapkan mampu memangkas rantai pasok distribusi pangan. Dengan memasarkan komoditas pangan langsung ke Kios Pangan, maka telah memotong rantai distribusi pemasaran sehingga harga dapat dikendalikan lebih rendah daripada harga pasar pada umumnya. Dalam rangka menjamin kepastian produksi, distribusi dan pemasaran hasil pangan dari sisi produsen serta jaminan kepastian stabilisasi harga dari sisi konsumen, maka diharapkan seluruh pemangku

kepentingan yang terkait dapat melaksanakan kegiatan secara lebih terkoordinasi dan terarah sehingga tujuan dari kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Kios Pangan dapat tercapai dan bermanfaat bagi produsen dan konsumen. Perkembangan Kios pangan per 30 April 2025 sebanyak 494 Kios Pangan yang tersebar di 33 Provinsi dan 113 Kabupaten/Kota.

15. Bela Beli Peternak daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras

Kegiatan bela beli daging ayam ras dan telur ayam ras dilaksanakan sebagai salah satu upaya wujud hadirnya pemerintah khususnya dalam menjaga stabilisasi harga Ayam Ras dan Telur Ayam Ras. Kondisi saat ini harga jual di tingkat produsen/peternak komoditas daging dan telur Ayam Ras masih jauh dibawah Harga Pokok Produksi (HPP) khususnya ukuran ayam 2,4 kg/ berat hidup (Live Bird) atau setara 1,8 kg ayam karkas. Produk peternak akan di beli oleh konsumen dengan harga yang menguntungkan peternak.

Kegiatan Bela Beli Daging dan Telur Ayam Ras dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 25 April 2025 di Lobby Kantor Badan Pangan Nasional, kegiatan merupakan tindak lanjut hasil rakortas Kemenko Pangan tanggal 17 April 2025 dimana Badan Pangan Nasional beserta kementerian/ lembaga dan BUMN akan melaksanakan bela beli Ayam Ras dan Telur Peternak sebagai bukti hadirnya pemerintah untuk mengatasi gejolak harga pangan dan untuk membantu Peternak.

Pasokan daging ayam ras dan telur ayam ras bersumber dari peternak Jawa Barat dan Banten yang tergabung dalam Pinsar Indonesia dan Pinsar Petelur Nasional (PPN) serta rekanan Mitra dari Bumi Food untuk olahan ikan yang ikut bergabung pada kegiatan bela beli produk peternak.

Komoditas yang tersedia yaitu Ayam Ras Karkas Segar dingin dengan ukuran 1,8 kg atau setara 2,4 kg/berat hidup(Live Bird) seharga Rp. 60.000/ ekor sebanyak 300 ekor atau kurang lebih 600 kg dan komoditas Telur Ayam Ras sebanyak 1.165 kg.

Dalam pelaksanaannya terdapat kementerian/lembaga yang turut berpartisipasi untuk membeli komoditas peternak. Kegiatan dapat terlaksana dengan baik karena partisipasi dari Kemenko Bidang pangan, Kementerian Pertanian, Perum BULOG, PT. BERDIKARI, Bank BRI, Bank Mandiri. Hadirnya pemerintah dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan turut membeli bahan pangan yang bergejolak untuk menjaga semangat petani/peternak untuk tetap berproduksi.

c) Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan

Kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan dan NSPK dalam rangka penyelenggaraan distribusi dan cadangan pangan meliputi penyusunan Kajian, Grand Desain, Rekomendasi, Peraturan Kepala Badan, Ketetapan Kepala Badan, Dokumen Penugasan, Petunjuk Teknis (Juknis), Panduan Kegiatan, Pedoman, Standart Operating Procedure (SOP), dan NSPK lainnya. Pada Bulan April 2025, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan telah melaksanakan kegiatan prioritas terkait dengan penyusunan rekomendasi kebijakan berupa Kajian Evaluasi Pengadaan Gabah dan Beras oleh Perum Bulog untuk CPP. Kajian ini disusun sebagai upaya mendapatkan rekomendasi perbaikan pelaksanaan pengadaan GKP dan Beras setelah adanya Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025. Sedangkan untuk penyusunan NSPK terdiri dari sebagai berikut:

- a) Rancangan Perbadan Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan;
- b) Rancangan Revisi Perpres Perubahan 125/2022;
- c) Rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional (Kemenko Ekon);
- d) Rancangan Instruksi Presiden tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (Kemenko Pangan).
- e) Rancangan Keptadan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Atas Penyelenggaraan Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah dan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah.

2. Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Perbadan Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan

Rapat koordinasi diselenggarakan secara hybrid di Hotel Aston Priority Simatupang Hotel and Conference Center, Jakarta tanggal 16 April 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan dihadiri oleh Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan, Kemenko Pangan, Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri, Kemenko Pangan, Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas, Bapanas, Direktur Ketersediaan Pangan, Bapanas, Direktur Logistik, Kementerian KKP, Perwakilan Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional, Kemenko

Perekonomian, Perwakilan Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan, Kementan, Perwakilan Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura, Kementan, Perwakilan Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementan, Perwakilan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan, Kementan, Perwakilan Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri, Kemendag, Perwakilan Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik, Kemendag, Perwakilan Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Kemenhub, Perwakilan Direktorat Pemasaran, Kementerian KP, Bahroin Idris T.S.E, M.Si, Dosen IPB, Perwakilan Biro Organisasi, SDM dan Hukum, Bapanas, Perwakilan Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Bapanas, PPK Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Bapanas, serta Pejabat fungsional lingkup Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan, Bapanas.

Masukan terhadap perbaikan per pasal dan penambahan usulan BAB Baru untuk penyempurnaan Rperbadan tersebut. Setelah rapat ini, akan dilakukan perbaikan substansi batang tubuh RPerbadan sesuai hasil masukan dari K/L sebelum dilaksanakan harmonisasi. Akan dilanjutkan dengan Penyusunan petunjuk teknis sebagai operasional pelaksanaan Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan sesuai masukan dari K/L dan penyusunan Juknis akan melibatkan K/L teknis terkait

3. Menghadiri Rapat Pembahasan Perunggasan Nasional

Rapat dilaksanakan secara hybrid di RR Utama I Ditjen PKH Gedung C Lt 6 dipimpin oleh Dirjen PKH Kementan, dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan, Tenaga Ahli Mentan Bidang Hilirisasi, Asdep Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan Kemenko Bidang Pangan, Direktur SPHP Bapanas, Plh. Direktur Bitpro Kementan, perwakilan Dit. DCP Bapanas, Dit. Pakan, Dit. Hilirisasi Hasil Peternakan, dan Dit. Keswan Kementan, serta Ketua Asosiasi dan Pimpinan Perusahaan Perunggasan. Mencermati rendahnya harga livebird tingkat peternak dibawah HPP, sehingga perlu segera diupayakan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga ayam ras pedaging. Semua stakeholder perlu mengupayakan langkah strategis dan taktis untuk mendorong perbaikan harga livebird menuju HPP peternak dan HAP yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengadaan Jagung untuk

Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2025

Rapat diselenggarakan pada tanggal 15 April 2025. Rapat dipimpin oleh Deputi 1 Bapanas, dihadiri oleh Ptl. Deputi II KSP, Asdep Stabilisasi Harga Pangan Kemenko Pangan, Asdep Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wil III BGN, Kadis Pertanian NTB, Kadis Peternakan NTB, Kadis Ketahanan Pangan NTB, Bupati Sumbawa, Kadis Pertanian Kab. Sumbawa, Kadis Ketahanan Pangan Kab. Sumbawa, Kadis Pertanian dan Perkebunan Kab. Bima, Kadis Pertanian dan Perkebunan Kab. Dompu, Kadis Ketahanan Pangan Kab. Dompu, Direktur OPP Bulog, Direktur Pengadaan Bulog, Pimwil Bulog NTB, perwakilan DJA Kemenkeu, Ditjen TP Kementan, Ditjen PKH Kementan, Dit. Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dit. Kepelabuhanan Kemehub, dan perwakilan asosiasi, koperasi, pelaku usaha.

Perkiraan panen raya di Kabupaten Sumbawa bulan April sampai Juni 2025 sebesar 504.109 ton. Terdapat 37 gudang penyimpanan dengan kapasitas simpan 162.200 ton tersebar di 9 (Sembilan) kecamatan. Petani di Kabupaten Sumbawa dan NTB tidak mampu menyediakan jagung dengan kadar air 14%, karena kurangnya fasilitas pengeringan jagung baik milik petani maupun pelaku usaha yang ada di wilayah NTB. Bupati Sumbawa mengharapkan adanya intervensi dari Pemerintah Pusat pada masa panen raya April-Juni 2025. Perum BULOG siap melaksanakan penugasan oleh Badan Pangan Nasional dalam rangka pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton BULOG dan siap bekerja sama dengan semua pihak untuk menyerap jagung pipilan kering KA 14% dengan harga Rp5.500/kg. Stok cadangan jagung pemerintah saat ini sebanyak 90 ribu ton yang telah dilakukan pelelangan dan sudah terjual sebanyak 15 ribu ton tersisa 79 ribu ton. Rendahnya hasil penjualan melalui pelelangan tersebut dikarenakan pelaksanaan lelang mendekati hari libur nasional. Menindaklanjuti hal tersebut akan dilakukan lelang ulang.

Asosiasi/Koperasi/Pelaku Usaha menyatakan komitmen mendukung program pengadaan jagung di wilayah NTB serta akan mengikuti proses lelang jagung yg dilaksanakan Bulog dan perlu adanya dukungan subsidi distribusi mengingat biaya distribusi Rp700/kg dan Harga beli pabrik pakan di wil. Jawa untuk jagung saat ini dibawah HPP

5. Menghadiri Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Rincian Penggunaan Dana (RPD) DAK Non Fisik TA 2025 sub bidang Pangan

Rapat dipimpin oleh ketua tim kerja Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Dana Transfer Khusus Kemenkeu, Direktorat Pembangunan Daerah Bappenas, Biro PKH, Dit PKP, dan Dit DCP Bapanas.

Biro PKH telah mengirimkan surat pengajuan perubahan RPD Nomor 359/PR.02.01/A.1/04/2025 kepada Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas yang terdiri dari usulan 29 kabupaten/kota dan 11 diantaranya merupakan usulan perubahan RPD kegiatan Penguatan LPM.

Usulan dari Bapanas terkait dengan perubahan RPD masih sesuai dengan timeline kerja kegiatan DAK Non Fisik th 2025. Usulan RPD hanya dapat dilakukan sekali, maksimal bulan Juni 2025. Tidak ada perubahan volume, tidak ada perubahan target dan tidak ada penambahan usulan baru. Perubahan RPD bersifat optimalisasi penggunaan dana sehingga masih sesuai koridor dan sesuai TOR

Kemenkeu Saat ini telah menyalurkan dana DAK Non Fisik 50% untuk 50 kabupaten/kota sesuai dengan alokasi anggaran dan ketentuan.

Kegiatan DAK Non Fisik Tahap I sudah dapat dilaksanakan dan dilaporkan pada bulan Juni 2025. Bapanas dapat melakukan konfirmasi dan koordinasi ke Pemda terkait perubahan RPD.

6. Rapat Koordinasi Perhitungan HPP GKG dan/Beras

Rapat berlangsung secara daring tgl 17 April dipimpin oleh Deputi Bid. Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas yang dihadiri oleh Plt. Deputi II KSP, Perwakilan K/L: Kemenkeu, Kemenko Pangan, Kementan, Kemendag, BPS, Perum BULOG serta Ketua/Perwakilan dari Asosiasi dan Pelaku Usaha: Perpadi, KTNA, SPI, dan Food Stasion. Rakor dilaksanakan sbg tindak lanjut terbitnya Inpres 6/2025 dimana pengadaan CBP tidak hanya dalam bentuk GKP dan Beras tetapi juga dalam bentuk GKG serta perlunya penetapan kebijakan HPP GKP/Beras dalam rangka percepatan penyerapan gabah/ beras untuk CBP yang masih di bawah angka target 3 juta ton sd April 2025. K/L mendukung ditetapkannya kebijakan HPP GKG dan penyesesuaian HPP beras dengan mempertimbangkan kondisi harga beras saat ini dan andil komoditas beras thd inflasi dimana kenaikan harga beras sebesar 10% memiliki andil 0,3% thd inflasi. Asosiasi/Pelaku Usaha mengusulkan perkiraan angka sementara/gambaran untuk HPP GKG dihitung 15% dari HPP GKP, jika GKP Rp6.500, harga GKG bertambah Rp1.000-1.200 dari GKP maka HPP GKG est.

Rp7.500/kg dan HPP Beras diasumsikan 2 kali dari HPP GKP maka beras medium di angka est. Rp13.000/kg.

Tindak lanjut: akan dilaksanakan rakor lanjutan terkait perhitungan HPP GKG dan Beras pada hari Senin/Selasa pekan depan, sehingga dari para Asosiasi/Pelaku usaha diharapkan dapat menyampaikan angka usulan/estimasi perhitungan serta dari K/L dapat menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dalam rangka penetapan kebijakan pemerintah.

7. Rapat Koordinasi Percepatan Distribusi Jagung dari Wilayah NTB ke Luar Wilayah NTB

Rapat berlangsung secara daring tgl 19 April dipimpin oleh Kepala Badan Pangan Bapanas yang dihadiri oleh jajaran pemvrop NTB, Pelindo, Dinas Pangan Prov/Kab se NTB, Pejagindo, dan GPMT.

Tantangan dalam hal pendistribusian jagung di NTB ke luar wilayah salah satunya kurangnya armada logistik dan terjadi antrian pengiriman logistik di 3 Pelabuhan utama di Pulau Sumbawa serta kurangnya gudang penyimpanan. Masukan dan Dukungan Gubernur NTB telah melaksanakan Rakorda dengan seluruh Bupati/Walikota di NTB untuk melakukan langkah-langkah dalam koordinasi untuk mengamankan produksi dan pendistribusian jagung ke wilayah yang membutuhkan jagung.

8. Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi. Pelaksanaan penyaluran CPP telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024. Pemerintah telah menetapkan paket stimulus kebijakan di bidang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di tahun 2025, bantuan pangan merupakan bagian dari paket stimulus kebijakan ekonomi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, bantuan pangan juga sebagai upaya bersama dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas harga pangan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai/PPN 12% (dua belas persen).

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri/Kepala Lembaga Nomor 084/SES.M.PANGAN/UND/12/2024 pada tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyampaian Kesimpulan Rapat Koordinasi Terbatas, Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Perum BULOG akan kembali melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan Beras pada tahun 2025 selama 2 (dua) bulan yaitu Januari-Februari 2025 sebanyak 10 (sepuluh) kilogram setiap keluarga yang akan diberikan kepada 16.000.000 Penerima Bantuan Pangan (PBP) berdasarkan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data PBP ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian PPN/Bappenas RI dan Badan Pangan Nasional tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi untuk Mendukung Penyelenggaraan Program Cadangan Pangan Pemerintah Nomor PKS 03/SES/01/2025 dan Nomor : 01/KS.02.01/B/1/2025 tanggal 20 Januari 2025. Data PBP tersebut sudah dilengkapi dengan nama, alamat lengkap (minimal menyebutkan desa), dan NIK. Menindaklanjuti surat Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nomor 083/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 tanggal 5 Februari 2025 perihal Penyampaian Risalah Lengkap Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan 31 Januari 2025, dapat diambil beberapa poin penting diantaranya:

- ❖ Penundaan bantuan pangan beras selama bulan Januari-Februari 2025;
- ❖ Penghentian sementara penyaluran SPHP Beras Tahun 2025 mulai tanggal 07 Februari 2025;
- ❖ Kebijakan pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran kembali SPHP beras diputuskan pada rapat koordinasi terbatas selanjutnya.

9. Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Cadangan Pangan Nasional merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) lebih lanjut diatur dalam Perpres 125/2022. Di dalam Perpres ini disebutkan terdapat 11 komoditas yang dikelola sebagai CPP, dan salah satunya adalah beras yang dikelola oleh Perum BULOG. Sebagai payung hukum penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), telah diterbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun

2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah. Melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, telah ditetapkan jumlah CBP yang dikelola pada Tahun 2025 minimal sebesar 3.000.000 (tiga juta) ton termasuk CBP di akhir Tahun 2025 minimal sebesar 2.000.000 (dua juta) ton.

Berdasarkan laporan manajerial Perum BULOG per 30 April 2025, total pengadaan CBP sampai dengan April 2025 mencapai sebesar 1.867.393 ton. Pengadaan dari dalam negeri sebesar 1.796.993 ton dan pengadaan dari luar negeri sebesar **70.400 ton**. Secara rinci realisasi pengadaan beras untuk CBP periode bulan s.d. April 2025 sebagaimana table berikut.

No	Rincian Pengadaan CBP 2025	Pengadaan (ton) s/d April 2025
1	Realisasi Pengadaan Beras CBP	662.721
2	Realisasi Gabah Setara Beras	1.134.272
Total Pengadaan Dalam Negeri		1.796.993
Total Pengadaan Luar Negeri		70.400
Jumlah Pengadaan (DN+LN)		1.867.393

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2025

Penyaluran CBP periode sampai dengan Bulan April 2025 terdiri dari penyaluran Beras SPHP sebesar **181.173 ton**, bencana dan keadaan darurat sebesar **137 ton**, Pengelolaan CBP terdiri dari stok akhir Tahun 2024/stok awal Tahun 2025 dan pengadaan selama 2025. Per akhir bulan April, stok/persediaan CBP sebesar **3.281.208 ton** (jumlah tersebut sudah meliputi stok awal Tahun 2025 sebesar **1.792.331 ton**). Jika dibandingkan dengan target jumlah minimal CBP yang dikelola berdasarkan kepbadan sebesar 3.000.000 ton maka realisasi pengelolaan CBP per April 2025 sudah terealisasi sebesar **109,37%**.

10. Pemantauan Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Untuk CPPD Provinsi, cadangan beras per minggu ke IV April 2025 dengan total sebesar 6.706,39 ton tersebar di 33 provinsi, sedangkan 5 (lima) provinsi belum memiliki regulasi cadangan beras pemerintah provinsi yaitu DKI Jakarta, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Pada bulan April, tidak ada provinsi yang melakukan pengadaan CBPD baru, sedangkan provinsi yang melakukan penyaluran ada 3 provinsi dengan total beras yang disalurkan sebanyak 95,75 ton. Terdapat 2 kab/kota yang melakukan pengadaan CBPD pada bulan April dengan total sebanyak 87,75 ton yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Banyumas. Sedangkan wilayah kab/kota yang melakukan penyaluran sebanyak 15 kab/kota dengan total penyaluran lebih dari 50 ton.

11. Pemantauan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

Selama kurun waktu 2023 sampai dengan saat ini implementasi dan fasilitasi pendanaan tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyediaan cadangan pangan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk melakukan Kegiatan Penguatan LPM. Kegiatan penguatan LPM yang dilakukan oleh Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan pada bulan April adalah pendampingan pelaksanaan DAK Non Fisik Tahun 2025 serta pemantauan data dan lokasi LPM melalui website aplikasi Sigap Nasional. Badan Pangan Nasional pada tahun 2025, mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dan Pangan terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Alokasi DAK Fisik meliputi Kegiatan Rehabilitasi LPM dan Penyediaan Sarana Pendukungnya kepada 16 Unit LPM, sedangkan alokasi DAK Non Fisik meliputi kegiatan Pelatihan serta Tambahan Biaya Operasional kepada 50 unit LPM. Namun DAK Fisik di tunda pelaksanaan sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 2025.

12. Penguatan Sarana Prasarana Logistik Pangan

Arah kebijakan dan strategi Badan Pangan Nasional salah satunya adalah menjamin keterjangkauan pangan yang dilakukan melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan dan strategi penguatan sistem logistik pangan nasional. Penguatan sistem logistik pangan nasional tersebut perlu didukung fasilitasi penguatan sarana dan prasarana logistik pangan. Bahan pangan memiliki karakteristik produk yang mudah rusak (*perishable*), produksi bersifat musiman, tidak merata antarwaktu dan antarwilayah sehingga rentan mengalami *losses* dan fluktuasi harga. Ketersediaan sarana dan prasarana khususnya rantai dingin menjadi solusi memperpanjang masa simpan dan menjaga kualitas produk sehingga konsumen mendapatkan pangan sesuai standar mutu. Teknologi penyimpanan menggunakan *cold storage* dan *dryer* telah terbukti dan mulai dimanfaatkan oleh para pelaku usaha pangan, namun jumlahnya masih terbatas karena harganya cukup mahal dan harus dikelola dengan perhitungan nilai keekonomian agar tidak merugi. Penyediaan alat berupa *cold storage* dan *dryer* merupakan salah satu solusi untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang pada tingkat perseorangan, daerah maupun nasional. Pengadaan sarana dan prasarana rantai dingin tahun 2025 sementara belum dapat dilaksanakan berkaitan dengan nota dinas Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 304/PR 02.01/A/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemberitahuan Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 lingkup Badan Pangan Nasional. Pemantauan terhadap sarana dan prasarana rantai dingin pengadaan tahun 2022-2024 rutin dilakukan setiap bulan. Data stok pangan sampai dengan April 2025 yang diolah/disimpan pada sarana dan prasarana rantai dingin dapat dilihat pada tabel berikut.

Provinsi	Penerima Alat	Komoditas	Stok (kg)
Sulawesi Selatan	PT. Berdikari United Live Stock	Daging ayam	12.579
Jawa Tengah	PT. Jateng Agro Berdikari (Perusda)	Daging ayam Olahan ikan	8.000
Lampung	CV Aulia Madina	Daging ayam	33.007
Jawa Barat	RPHU PT Berdikari	Daging Ayam	3.490
Jawa Barat	RPHU PT Berdikari	Daging Ayam	63.906
Sulawesi Selatan	CV. Harapan Baru Farm	Daging Ayam	4.000
Sulawesi Selatan	AW Factory	Daging Ayam	1.100
Banten	PT. Agrobisnis Banten Mandiri	Daging Ayam	569

BAB IV. PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional pada periode bulan APRIL Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (enam) KRO dan 6 output/RO berdasarkan pembagian dari masing-masing Direktorat lingkup Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp87.921.079.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Sejalan dengan perkembangan anggaran, terjadi revisi anggaran pada DIPA akibat adanya alokasi anggaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sehingga anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menjadi Rp2.548.458.010.000,-.
2. Berdasarkan pemantauan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan posisi tanggal 30 APRIL 2025, realisasi anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebesar Rp37.762.817.124,- atau 1,48% dari alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.548.458.010.000,-. Realisasi tersebut masih jauh dari rencana penarikan bulan APRIL 2025, yaitu sebesar Rp254.845.801.000,-. Faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi karena adanya alokasi anggaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sehingga mempengaruhi terhadap capaian realisasi. Selain itu, belum meratanya penyerapan anggaran di masing-masing RO di setiap Direktorat yang diakibatkan perencanaan kegiatan tidak terjadwal secara rutin. Dengan demikian realisasi tersebut masih jauh dari target serapan anggaran sebesar 10% dari pagu anggaran. Sementara realisasi anggaran Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan berdasarkan hasil aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025 sebesar Rp40.548.463.994,- atau 1,59% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.548.458.010.000,- sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.510.695.192.876,-. Sisa anggaran yang relative besar perlu dibuat perencanaan bulanan secara terukur sehingga pada akhir tahun tidak terjadi permasalahan.

3. Pada bulan APRIL terdapat penambahan realisasi fisik dengan rincian, yaitu 6 RO Rekomendasi, 4 RO Koordinasi, 6 RO NSPK, Pangan Terdistribusi 20 Kelompok Masyarakat, 1 Kelompok GPM, 1 Kelompok Kios Pangan, dan 3 RO Data dan Informasi, serta 2.238.906 Paket CPP. Rendah realisasi anggaran terhadap target perlu menjadi perhatian agar perencanaan keuangan di masing-masing RO menjadi lebih baik di bulan selanjutnya.

IV.2. Permasalahan

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan pada Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama bulan APRIL Tahun 2025 untuk memenuhi target output dan capaian outcome. Namun capaian kinerja realisasi keuangan dan fisik pada bulan tersebut belum dapat maksimal, hal ini disebabkan karena :

1. Terdapat kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan dan persiapan kegiatan.
2. Pembayaran honor petugas enumerator harga mengalami kendala karena ada perubahan mekanisme pembayaran.
3. Belum tersedianya anggaran sebagai dampak instruksi untuk penghematan Belanja Perjalanan Dinas dan Penyelenggaraan Meeting serta Efisiensi Belanja K/L secara keseluruhan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 baik di Pusat maupun di Daerah.
4. Masih terdapat revisi untuk efisiensi belanja dan penyesuaian anggaran lingkup Badan Pangan Nasional, sehingga menghambat pelaksanaan persiapan pelaksanaan kegiatan.
5. Belum ada kejelasan untuk menyelenggarakan kembali Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah baik melalui Bantuan Pangan maupun kegiatan Stabilisasi Harga dan Pasokan Harga Pangan (SPHP) di Tahun 2025.
6. Perencanaan kegiatan yang tidak terjadwal secara baik.

IV.3. Rekomendasi

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama Tahun 2025 tetap berjalan sesuai petunjuk operasional kegiatan dan mempercepat pemenuhan dokumen pendukung realisasi periode bulan selanjutnya. Selain itu melakukan langkah strategi, antara lain:

1. melakukan penyusunan rencana penarikan anggaran baik melalui metode LS maupun TUP untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah secara rutin dan serta sosialisasi regulasi Perbadan
3. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia melalui koordinasi penyelesaian sisa pembayaran penyaluran Bantuan Pangan, penguatan pemantauan pelaksanaan DAK Non Fisik 2025, dan kegiatan lainnya lingkup DCP yang tidak termasuk dalam efisiensi Inpres.
4. Koordinasi secara intensif antar pihak terkait penyaluran bantuan pangan
5. Melakukan koordinasi dengan pengelola keuangan.

